

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku Dan Kota Ambon)**

Mahendra Rupilu¹, Linda Grace Loupatty², Yuyun Yuniarti Layn³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon

Email : lindagrace.loupatty@gmail.com*

ABSTRACT

This research aims to test and analyze whether the implementation of public sector accounting and monitoring the quality of financial reports has an effect on the accountability of the financial performance of the Maluku Province regional government. This research was conducted at the Maluku Provincial Inspectorate Office and the Ambon City Inspectorate Office. This type of research is quantitative research using primary data, where data is obtained using survey data collection techniques using questionnaires. And given to 37 auditors at the Maluku Provincial Inspectorate Office and the Ambon City Inspectorate Office. Data analysis uses multiple linear regression statistical analysis (multiple regression analysis). The results of the study show that the implementation of public sector accounting has a positive and significant influence on the accountability of local government performance and supervision of the quality of financial reports has a negative and insignificant influence on the accountability of local government performance.

Keywords: Public sector accounting, quality of financial reports, accountability, regional government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku dan Kantor Inspektorat Kota Ambon. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dimana data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data survey yang menggunakan kuesioner. Dan di berikan kepada 37 auditor di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku dan Kantor Inspektorat Kota Ambon. Analisis data menggunakan analisis statistik regresi linier berganda (multiple regression analyzes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi sektor publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan Pengawasan kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : Akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, Pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi analitis dan teknis yang digunakan untuk pengelolaan dana publik di perusahaan dan sub-lembaga di tingkat nasional (Bastian, 2011). Pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan kebijakan reformasi keuangan, baik itu ditingkat nasional maupun daerah agar tercapainya *good governance* dalam instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi isu kebijakan strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan dalam hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya *good governance*. Dampak dari perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga sangat signifikan dalam bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2012).

Penerapan standar akuntansi pemerintah sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dan dipahami secara konsisten oleh penyaji, pengguna, dan pengawas laporan keuangan. Diharapkan bahwa dengan menerapkan praktik akuntansi yang baik dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, akan terjadi perbaikan dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi. Penerapan akuntansi sektor publik di pemerintah daerah Kota Ambon didasarkan pada beberapa peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, ini mencakup Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan, Peraturan No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pedoman Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Administrasi Keuangan (SPAMK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kota Ambon tahun 2022, terungkap adanya ketidaktepatan dalam penganggaran dan realisasi belanja di beberapa organisasi perangkat daerah, khususnya belanja barang dan jasa pada sekretariat kota ambon sebesar Rp33,3 miliar. Dari total tersebut, Rp. 9,5 miliar perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus, dan mencatatkan rekomendasi agar anggaran Rp. 7,2 miliar disetor ke kas daerah dan inspektorat. Masalah pengelolaan kas pemerintah kota Ambon mencakup tekor sebesar Rp. 2,19 miliar dan permasalahan aset senilai Rp. 60,7 miliar yang direkomendasikan untuk penatausahaan ulang di OPD Terkait. Laporan BPK bersifat disclaimer dan menyoroti masalah aset, termasuk ketidakjagaan aset lama seperti motor dan mobil yang menyebabkan beban penyusutan. Temuan lain mencakup belanja barang dan jasa yang terekam dalam catatan tetapi belum diverifikasi serta perjalanan dinas pada 20 OPD dengan total nilai sebesar Rp. 2,19 miliar dan 1 dinas sebesar Rp. 500 juta yang belum dapat dipertanggungjawabkan. (<https://siwalimanews.com/>). Permasalahan yang terjadi, dapat digambarkan bahwa kinerja inspektorat kota

Ambon belum maksimal. Dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, yaitu dalam mengawasi keuangan daerah, inspektorat kota Ambon belum mampu mengungkapkan temuan audit yang terjadi secara keseluruhan. Hal ini membuat kinerja auditor menjadi sorotan, karena ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK). Hal ini menggambarkan bahwa kinerja auditor aparat inspektorat kota Ambon masih relatif rendah. Karena hasil temuan tersebut diduga kuat bahwa inspektorat kota Ambon tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan harus dilakukan evaluasi (<https://titastory.id/>).

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. (sugiono 2019). Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan (tidak melalui perantara). Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data dalam bentuk kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat Provinsi Maluku dan Kantor Inspektorat Kota Ambon yang berlokasi di Jl. Pattimura, No.1, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97124.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dirancang untuk pengujian pada tanggapan responden terhadap penerapan akuntansi industri yang berbeda pengungkapan, pengendalian kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah sesuai dengan indikator yang dijelaskan dalam konsep operasional.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi variabel	Indikator	Skala pengukuran
1	Penerapan akuntansi sektor publik (X ₁) Fildzah ikrami (2021)	Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat	1) Analisis bukti transaksi. 2) Pencatatan data transaksi. 3) Pengikhtisaran.	SS= Sangat setuju S = Setuju N=Tidak ada pendapat/ ragu-ragu

		di lembagalembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta Fildzah Ikram (2021).	4) Pelaporan	TS=Tidak setuju STS =Sangat tidak Setuju
2	Pengawasan kualitas laporan keuangan (x2) Muhammad Syahputra Rizki (2023).	Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan suatu tindakan pengawasan yang menilai baik buruknya pelaporan dan pertanggungjaw aban pengelolaan kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi. Muhammad Syahputra Rizki(2023)meny ebutkan bahwa tujuan penerapan pengawasan adalah tercapainya	a. Relawan b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan c. Kelengkapan informasi yang disajikan d. Penyajian secara jujur e. Isi laporan keuangan dapat diperiksa f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan informa si yang disajikan dalam laporan keuangan harus	SS = sangat setuju S = setuju N = tidak ada pendapat/ ragu-ragu TS = tidak setuju STS = sangat tidak Setuju

		<p>laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi.</p>	akurat dan jelas	
3	<p>Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (y)</p> <p>Muhammad Syahputra Rizki(2023)</p>	<p>Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk</p>	<p>a. Kualitas (mutu)</p> <p>b. Kuantitats (jumlah)</p> <p>c. Ketepatan waktu</p> <p>d. Efektivitas Efisiensi</p>	<p>Ss= sangat setuju</p> <p>S = setuju</p> <p>N=tidak ada pendapat/ragu-ragu</p> <p>Ts=tidak setuju</p> <p>Sts =sangat tidak Setuju</p>

		mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik tugas yang telah dibebankan kepadanya.		
--	--	---	--	--

Sumber data diolah tahun 2023

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket/kuesioner. Angket ini berisi pernyataan terulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden

Uji Kualitas Data

Uji validitas dan uji reabilitas juga digunakan dalam penelitian ini. Sugiono (2014 : 168) menyatakan uji validitas dan uji reabilitas merupakan alat pengumpulan data untuk mengetahui validitas kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dinyatakan valid. Sedangkan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama dinyatakan reliable.

A. Uji validitas

Zainal arifin (2011:245) mengatakan validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas ditujukan untuk menguji sejauh mana alat ukur dalam hal ini. Menurut Sugiyono (2010 : 177) dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli

(expert judgement). Untuk mengetahui tingkat validitas instrument yaitu dengan mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total sebagai kriterium. Ketentuan untuk mengukur apakah suatu instrument valid atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, jika r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikan 5%, maka butir instrument dikatakan valid.

B. Uji reabilitas

Reabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan konsisten. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat reliabilitas internal suatu alat ukur. Pada penelitian ini, akan dilakukan uji reliabilitas dengan koefisien cronbach alpha. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai alpha ($>$) 0,6. Ghazali (2014). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha.

Uji asumsi klasik

Terdapat empat pengujian yang dilakukan dengan uji asumsi klasik, yaitu dengan menggunakan: uji normalitas, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji normalitas Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data signifikansi alpha 5% yang dilihat adalah hasil uji dengan cara kolmogorov-smirnov. Data dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 5% (0.05) ataupun sebaliknya.
2. Uji multikolinieritas tujuan uji multikolinieritas yaitu untuk menguji apakah suatu model regresi ada hubungan antara variabel independen. Semakin mengecil hubungan diantara variabel independen maka makin baik model regresi yang didapatkan. 46 ibid., 45. 47 ibid., 161. 31 untuk melaksanakan uji gejala multikolinieritas dengan melihat tolerance value atau variance inflation faktor (vif) sebagai berikut:⁴⁸
 - a) apabila tolerance value $>$ 0,1 dan vif $<$ 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen.
 - B) apabila tolerance value $<$ 0,1 dan vif $>$ 10 maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen.
3. Uji heterokedastisitas, tujuan dilakukan uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan deviasi atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Deviasi dan residual dikatakan homoskedastisitas apabila satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap dan disebut heteroskedastisitas jika satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda. Uji heterokedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai signifikansi $>$ 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dan data dapat digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda.

Analisis linier berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan variabel independen atau dependen berhubungan positif dan negatif. Dengan persamaan:

$$Y = A + B_1x_1 + B_2x_2 + E$$

Keterangan:

y = akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a = konstanta

$b_{1,2}$ = koefisien regresi

x_1 = penerapan akuntansi sektor publik

x_2 = pengawasan kualitas laporan keuangan

E = tingkat eror

Uji Hipotesis

1. Uji signifikan parsial (uji statistik t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (signifikansi), dimana apabila nilai signifikan $t < 0,05$, maka itu artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen, sebaliknya apabila nilai signifikan $t > 0,05$ itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (ghozali, 2013). Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat dari koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien Regresi negatif berarti pengaruh negatif.

2. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (r^2) pada dasarnya ini mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Niali r^2 artinya kemampuan variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi deviasi variabel independen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena terdapat deviasi yang besar antar tiap observasi, sedangkan untuk data time series biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis linier berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan variabel independen atau dependen berhubungan positif dan negatif. Dengan persamaan:

$$Y = A + B_1x_1 + B_2x_2 + E$$

Keterangan:

y = akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 α = konstanta
 $b_{1,2}$ = koefisien regresi
 x_1 = penerapan akuntansi sektor publik
 x_2 = pengawasan kualitas laporan keuangan
 E = tingkat eror

Tabel 4. 1 Uji Analisis linier berganda

Model	Variables	Coefficients ^a			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance
1	(Constant)	37.458	7.750		4.833	.000	
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.402	.176	.362	2.280	.029	.994 1.006
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.092	.152	-.096	-.604	.550	.994 1.006

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Dari Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta adalah nilai 37.458, hal ini dapat diartikan apabila variable Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Konstan, maka besar nilai variable Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menjadi 37.458, nilai koefisien regresi Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,402 yang berarti apabila regresi Penerapan Akuntansi Sektor Publik meningkat satu satuan maka nilai akan meningkat 0,402 satuan, artinya semakin meningkat Penerapan Akuntansi Sektor Publik maka akan berdampak naik terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah. Sedangkan nilai koefisien regresi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_2) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,092 yang berarti apabila regresi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan meningkat satu satuan maka nilai akan meningkat 0,092 satuan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_2) mempunyai Pengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, artinya semakin meningkat Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan maka akan berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r^2) pada dasarnya ini mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Niali r^2 artinya kemampuan variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi deviasi variabel independen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena terdapat deviasi yang besar antar tiap

observasi, sedangkan untuk data time series biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variable terikat.

Tabel 4. 2 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.382 ^a	.146	.096	4.610	1.701

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Dari tampilan output SPSS diatas model summary besarnya adjusted R adalah 0,096, hal ini berarti 9,6% variasi variable dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) dapat dijelaskan oleh variasi dari ke Dua variabel independent (Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi Sektor Publik). Sedangkan sisanya ($100\%-9,6\% = 90,4\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model variable yang tidak diteliti. Seperti bukti fisik jaminan dan harga dan lain-lain.

Uji signifikan parsial (uji statistik t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (signifikansi), dimana apabila nilai signifikan $t < 0,05$, maka itu artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen, sebaliknya apabila nilai signifikan $t > 0,05$ itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (ghozali, 2013). Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat dari koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien Regresi negatif berarti pengaruh negatif.

Tabel 4. 3 Uji signifikan parsial (uji statistik t)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	37.458	7.750		4.833	.000
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.402	.176	.362	2.280	.029
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.092	.152	-.096	-.604	.550

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Mencari t tabel :

Jumlah responden (n) = 37 Orang

Jumlah variabel bebas (k) = 2

Tarif signifikansi α = 5%

Degree of freedom (df) = n-k = 37 - 2 = 35

t tabel = 2.03011

- **Hasil Uji t Variabe X1**

Pengaruh Variabel Independen Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Variabel Dependen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Hasil pengujian variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memberikan hasil nilai t hitung sebesar 2.280 serta nilai t tabel sebesar 2.03011. Dimana nilai t hitung > t table dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima bahwa pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

- **Hasil Uji Variable X2**

Pengaruh Variabel Independen Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) terhadap Variabel Dependen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Hasil pengujian variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memberikan hasil nilai t hitung sebesar -0.604 serta nilai t tabel sebesar 2.03011. Dimana nilai t hitung < t table dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak bahwa pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil pengolahan data terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya, serta pola perilaku yang harus dilakukan

untuk mengatasi hal-hal tersebut, Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan Akuntansi Sektor Publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Provinsi Maluku Dan Kota Ambon.

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0.290 lebih besar dari 0.50. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1), berpengaruh positif terhadap Akuntansi sektor publik. memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Provinsi Maluku Dan Kota Ambon.

Hasil pengujian hipotesis kedua untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0.604 serta nilai t tabel sebesar 2.03011.

KESIMPULAN

1. Penerapan akuntansi sektor publik mempunyai Pengaruh positif dan Signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terukur melalui tahapan prosedur penyusunan anggaran sesuai dengan standar akuntabilitas atau standar pelaporan akuntabilitas sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi yang dibarengi dengan pengawasan oleh pihak eksternal dan internal yang dilakukan secara independensi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan sesuai standar pemerintahan yang berlaku sehingga menghasilkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik.
2. Pengawasan kualitas laporan keuangan mempunyai Pengaruh negatif dan Tidak Signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tindakan demikian dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan untuk penilaian atas dasar

akuntabilitas departemen. Dengan hasil yang berpengaruh negatif pada penelitian ini, bisa dipastikan bahwa kinerja dari laporan keuangan Pemerintah daerah belum memumpuni sehingga Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa dikatakan belum baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, Rita dan Akbar, S. H. (2014). “Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas Dan Skipme Profesional Terhadap Kualitas Audit”. *Jurnal akuntansi*. Vol. 2, no. 2, april 2014 : 139–148. ISSN : 2337-4314.
- Bastian, I. (2011). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- BPKP. (2011). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010. Jakarta Timur: Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan.
- Bambang pamungkas(2012) pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah volume 12 no. 2.
- Bintaurina, S., Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(1).
- Dwiyanto, A. (2012). Reformasi Birokrasi di Indonesia, Edisi : Cet. Keempat. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Eviyanti, E., Mas' Ud, A., Hakim, A., & Kalsum, U. (2023). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Di Inspektorat Kabupaten Konawe. *Ijma (Indonesian Journal Of Management And Accounting)*, 4(2), 236-254
- Faiz, M. A. S., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 656-661.
- Fildzah ikrami (2021) pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada kecamatan siantar timur kota pematangsiantar).
- Intan Fedrianawati, Erlina .(2017).”Pengaruh Penerapan Akuntasi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Ponorogo”. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Jannaini. Yuli.(2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung) Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.

- Kadarman dan Jusuf Udaya 2001. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Gloria.
- Kneefel, E. O., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kode Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. *Going concern: jurnal riset akuntansi*, 12(2).
- Lusi, R.J, (2008) pengaruh kompetensi, independensi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan budaya organisasi sebagai variable moderasi pada inspektorat kepolisian daerah kalimantan barat.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: BPFE
- Miranda,d. &a.,n (2022) analisis laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten wonosobo
- Muhammad, S, Rizki, (2023). pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerinta provinsi sumatera utara pada badan keuangan dan aset daerah jurnal lentera bisnis issn cetak 2252-9993, issn online 2598618 jilid 12, nomor 2, mei 2023.
- Nurfadilah, Y., & Santoso, S. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 99-111.
- Oka, RA, (2022). pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* Vol. 12 No. 2
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standa Akuntansi Pemerintahan . Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2017
- Pintasari, Dayanara (2015). Pengaruh Kompetensi Auditor, Akuntabilitas dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit pada KAP di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Payapo, D. C. S., Sari, R., & Ibrahim, F. N. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas dan Etika Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Kantor Inspektorat Kota Ambon. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 323-343.

- Ramdhanu, L. R. (2019). Pengaruh Penerapan Laporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada BAPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017).
- Ridzal, NA (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Keuangan: Jurnal Akuntansi*, 6 (1), 87-97.
- Salju, S., Rismawati, R., & Bachtiar, M. D. (2016). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4 (2).
- Sri Ayem Anisa, (2018). Pengaruh komitmen organisasi dan penerapan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah terhadap kinerja auditor pemerintah(studi kasus pada badan pengawasan keuangan dan Pembangunan perwakilan daerah istimewa yogyakarta) vol 15 no 2
- Tri, Rezeki (2022). Pengaruh penerapan akuntasi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah_kota bogor.
- Trisnaningsih, S. (2007). Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor. *Simposium Nasional Akuntansi*, 10 (1), 1-56.
- Veny marlena, pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sector publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bengku.
- Wina, I. P., & Khairani, S. (2014). “Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Stsudi kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)”. *Jurnal: DocoBook*